

## **BAB V**

### **PENUTUP**

#### **5.1 Kesimpulan**

Proses urbanisasi yang terjadi di Kota Surakarta merupakan suatu proses yang terjadi sangat cepat dan telah memberikan pengaruh terhadap daerah internal perkotaan Surakarta maupun daerah eksternal Kota Surakarta. Kota Surakarta yang menjadi Pusat Kegiatan Nasional (PKN) di Provinsi Jawa Tengah ini memiliki luas wilayah yang sangat kecil, yaitu sebesar 44,04 km<sup>2</sup>. Pada tahun 2000, jumlah penduduk Kota Surakarta telah mengalami penurunan dengan kepadatan penduduk bruto sebesar 11.131 jiwa/km<sup>2</sup>. Kepadatan penduduk Kota Surakarta tersebut sudah terkategori sangat padat. Dari sisi dampak internal, proses urbanisasi Kota Surakarta memberikan pengaruh salah satunya pertambahan jumlah penduduk namun hanya hingga tahun 2000, sedangkan dampak eksternalnya adalah kabupaten-kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta dalam perjalanannya juga ikut berkembang. Hal ini terjadi karena adanya keterbatasan lahan Kota Surakarta untuk menampung aktivitas penduduknya. Akibatnya kawasan perkotaan yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta berkembang menjadi suatu pusat aktivitas lain. Dalam istilah lain, proses urbanisasi Kota Surakarta telah menciptakan terjadinya fenomena *extended urban region*, di mana kawasan perkotaan Kota Surakarta melebar atau merambat ke kawasan perkotaan di sekitar Kota Surakarta. Kabupaten yang mendapatkan pengaruh atas proses urbanisasi Kota Surakarta inilah yang dikenal sebagai Kawasan Metropolitan Solo Raya dan menjadi kawasan strategis Jawa Tengah.

Proses urbanisasi dengan terjadinya fenomena *extended urban region* membuat Kabupaten Sukoharjo, Kabupaten Karanganyar dan Kabupaten Boyolali yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta mendapatkan pengaruh yang lebih besar dibandingkan kabupaten lain yang tidak berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Kecuali pada Kabupaten Klaten, perkembangan kabupaten ini tidak saja dipengaruhi karena proses urbanisasi Kota Surakarta melainkan juga karena adanya magnet lain yaitu Provinsi D.I. Yogyakarta. Proses urbanisasi yang terjadi mengembangkan kecamatan di sekitar Kota Surakarta menjadi pusat-pusat pelayanan yang berkembang lebih tinggi daripada ibukota kabupaten dan membentuk model spasial *polycentric urban region*. Perkembangan Kawasan Metropolitan Solo Raya sendiri dimulai sejak mulai berkembangnya Kecamatan Grogol di Kabupaten Sukoharjo menjadi kota mandiri Solo Baru di tahun 1995. Hasil temuan studi menunjukkan bahwa di tahun 1990 pusat pelayanan Kawasan Metropolitan Solo Raya masih tersebar di tiap kabupaten dan kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta belum menjadi pusat pelayanan, kecuali Kecamatan Kartasura. Setelah munculnya pembangunan Solo Baru di Kecamatan Grogol pada tahun 1995, Kecamatan Grogol langsung naik menjadi orde II dalam sistem

pusat pelayanan Kawasan Metropolitan Solo Raya. Jika di tahun 1995 jumlah pusat pelayannya sebanyak 17 kecamatan dan tersebar paling banyak di kecamatan yang tidak berbatasan langsung dengan Kota Surakarta, berbeda dengan pusat pelayanan di tahun 2015. Pada tahun 2015 jumlah pusat pelayannya ialah 15 kecamatan dengan struktur sistem pusat pelayanan yang telah berubah, di mana pusat pelayanan yang tidak berbatasan langsung dominasi kepusatannya melemah, sedangkan pusat pelayanan yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta dominasi kepusatannya menguat. Pada ibukota Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar, hirarki ordenya berada di bawah hirarki orde kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Hal ini tentu menjadi suatu ironi karena sebagai pusat pelayanan kabupaten, ibukota Kabupaten Sukoharjo dan Kabupaten Karanganyar justru tidak menjadi pusat pelayanan utama dan tertinggi di kabupaten. Selain tidak menjadi pusat pelayanan tertinggi di kabupaten, kecepatan perkembangan ibukota kabupaten tersebut juga lebih lambat dibandingkan kecamatan-kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Meskipun demikian, pelayanan fasilitas pelayanan sosial dari ibukota kabupaten yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta lebih baik dibandingkan pelayanan fasilitas pelayanan sosial kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta.

Selain 13 pusat pelayanan di tahun 2015, terdapat 6 kecamatan lain yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta dan juga mendapatkan pengaruh atas proses urbanisasi Kota Surakarta, yaitu Kecamatan Ngemplak, Baki, Gatak, Mojolaban, Gondangrejo, dan Kebakkramat. Fenomena *extended urban region* yang menjadi salah satu dampak penciri dari urbanisasi Kota Surakarta tidak saja menciptakan pusat-pusat aktivitas baru, tetapi juga menciptakan pusat permukiman. Perkembangan 6 kecamatan yang menjadi pusat permukiman tersebut juga berkembang sangat cepat di tahun 2000-an. Peningkatan jumlah penduduk menjadi salah satu penciri perkembangan pusat permukiman karena pengaruh proses urbanisasi Kota Surakarta dan sebagai pengaruh akibat memusatnya aktivitas di sekitar Kota Surakarta. Ketersediaan fasilitas pelayanan yang menjadi respon atas peningkatan jumlah penduduk justru menunjukkan perkembangan yang berbeda. Kecepatan perkembangan pusat permukiman yaitu di tahun 2000-an tidak menunjukkan adanya peningkatan pelayanan fasilitas pelayanan sosial. Dari 6 pusat permukiman, hanya Kecamatan Baki dan Ngemplak yang mengalami peningkatan pelayanan.

Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa proses urbanisasi Kota Surakarta yang mengalami fenomena *extended urban region* telah memberikan pengaruh yang sangat besar terhadap perkembangan kecamatan di sekitarnya. Salah satunya ialah Perubahan struktur kepusatan dari kabupaten di Kawasan Metropolitan Solo Raya. Jumlah penduduk Kota Surakarta yang semakin menurun diikuti dengan meningkatnya pelayanan fasilitas sosial. Namun, sebagai dampaknya, kecamatan yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta mengalami perkembangan pelayanan yang menurun dan mengalami percepatan pembangunan sebagai kota penyangga Kota Surakarta.

## 5.2 Rekomendasi

Setelah mengetahui temuan studi dan kesimpulan dalam penelitian ini, maka dapat disusun rekomendasi-rekomendasi. Rekomendasi tersebut akan dibagi menjadi rekomendasi untuk temuan studi dan rekomendasi untuk penelitian lanjutan.

### 5.2.1 Rekomendasi Temuan Studi

- a. Mendorong perkembangan pusat pelayanan di kabupaten yang tidak berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Hal ini dikarenakan pusat pelayanan yang tidak berbatasan langsung dengan Kota Surakarta berada pada hirarki orde yang lebih rendah dibandingkan pusat pelayanan yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta. Akibatnya pemusatan aktivitas terlalu berfokus di sekitar Kota Surakarta. Perkembangan pusat pelayanan yang tidak berbatasan langsung dengan Kota Surakarta ini diperlukan agar aktivitas masyarakat tidak semuanya tertuju ke sekitar Kota Surakarta dan peran pusat pelayanan dapat berperan lebih baik.
- b. Mengontrol keseimbangan jumlah penduduk antara pusat pelayanan dan pusat permukiman. Kedua pusat tersebut mengalami peningkatan jumlah penduduk di tiap 5 tahunnya. Hal tersebut tentu saja dipengaruhi oleh proses urbanisasi Kota Surakarta. Namun, kepadatan penduduk di pusat pelayanan lebih tinggi daripada pusat permukiman yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta.
- c. Pembangunan pusat permukiman di sekitar ibukota kabupaten. Perkembangan pusat permukiman yang berbatasan langsung dengan Kota Surakarta berlangsung dengan cepat. Namun, di sekitar ibukota kabupaten tidak menunjukkan adanya pemusatan aktivitas permukiman. Pembangunan pusat permukiman tersebut diperlukan untuk menarik pelayanan dari pusat permukiman dan digeser di sekitar ibukota kabupaten.

### 5.2.2 Rekomendasi Penelitian Lanjutan

- a. Perkembangan pusat pelayanan dan pusat permukiman dapat dilihat secara mendetail dengan membandingkan perubahan penggunaan lahannya secara spasial. Dalam penelitian ini, perkembangan pusat pelayanan dan pusat permukiman masih dilihat dari data statistik. Pemanfaatan analisis spasial dalam melihat perkembangan pusat pelayanan dan pusat permukiman akan lebih memperluas pengetahuan bidang perencanaan wilayah dan kota.
- b. Pembahasan kebijakan terpadu wilayah Kawasan Metropolitan Solo Raya. Hal ini disebabkan kebijakan mengenai Kawasan Metropolitan Solo Raya sangat bermanfaat dalam mem
- c. Meneliti *driving factor urban sprawl* atau perkembangan Kawasan Metropolitan Solo Raya secara kualitatif yaitu dengan metode wawancara dan *Analytical Hierarchy Process* (AHP).